

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERTANGGUNGJAWABAN

2026

PERDAKAB BANGKA NO 6, LD 2026/ NO 6 SERI D, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERDA Kab Bangka No. 9 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kab Bangka No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Kab No. 9 Tahun 2016; PERDA Kab Bangka No. 9 Tahun 2024; PERDA Kab Bangka No. 2 Tahun 2025.
- Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, yang meliputi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Peraturan Daerah ini juga memuat lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, yang berisi rincian laporan keuangan dan informasi terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

CATATAN - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2026 dan ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2026.